

## Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Jambi Dengan Pendekatan Indeks Theil

Siska Fitriana Sari<sup>1\*</sup>, Roni Saputra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia

\* Corresponding Author. E-mail: [siska.fitrima@gmail.com](mailto:siska.fitrima@gmail.com)

### Abstrak

Kondisi ideal suatu pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kondisi umum yang terjadi di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Jambi diiringi dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang menunjukkan terjadinya kenaikan ketimpangan antar individu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diikuti dengan indeks wiliamson yang mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jambi, mengetahui pengelompokan wilayah di provinsi Jambi, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jambi serta menjelaskan implikasi kebijakan dari hasil studi yang dilakukan. Alat analisis yang digunakan adalah berupa tipologi Klassen, Indeks Theil dan Regresi Berganda. Hasil penelitian berdasarkan tipologi Klassen menunjukkan bahwa daerah kategori maju adalah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjab Barat, sedangkan daerah maju tapi tertekan yaitu Kabupaten Batang Hari dan Bungo, kemudian daerah yang sedang berkembang yaitu Kabupaten Kerinci, Tanjab Timur dan Kota Jambi, sementara daerah tertinggal yaitu : Kabupaten Merangi, Sarolangun dan Tebo.

**Kata kunci:** ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, IPM, RBI

### Abstract

*The ideal condition of an economic development will produce high economic growth while increasing welfare and reducing the level of economic inequality. This is different from the general conditions that occur in Jambi Province. The high economic growth in Jambi Province is accompanied by increasing income inequality which indicates an increase in inequality between individuals. High economic growth was also followed by the Williamson index which increased, this indicates an increase in economic inequality between regions in Jambi Province. This study aims to determine the development of economic inequality between regions in Jambi Province, determine regional groupings in Jambi province, determine the factors that influence economic inequality between regions in Jambi Province and explain the policy implications of the results of the study conducted. The analysis tools used are Klassen typology, Theil's Index and Multiple Regression. The results based on Klassen's typology show that the developed categories are Muaro Jambi Regency and West Tanjab Regency, while the developed but depressed areas are Batang Hari and Bungo Regencies, then developing areas are Kerinci Regency, East Tanjab and Jambi City, while the underdeveloped areas are: Merangi, Sarolangun and Tebo Regencies.*

**Keywords:** Economic Inequality, Economic Growth, HDI, RBI

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan yang dilakukan selama ini dalam skala nasional menimbulkan masalah pembangunan yang cukup kompleks. Pembangunan dalam skala nasional lebih fokus pada daerah perkotaan besar dan terkonsentrasi di daerah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland dan penunjang pusat pertumbuhan mengalami terkurasnya sumber daya yang berlebihan, sehingga pada akhirnya akan mengganggu pembangunan yang diharapkan. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, perbedaan sumber daya dan perbedaan permasalahan yang ada di masing-masing provinsi menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah (Terok, Engka & Tumangkeng, 2019). Ketimpangan ekonomi dalam hal ini pembagian pendapatan adalah ketimpangan perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Ekwarso, Taryono & Isyandi, 2016; Pauzi & Budiana, 2016; Yusniar, 2019).

Penelitian terdahulu menyebutkan tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak disertai penurunan ketimpangan antar daerah. Indikator ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi dengan indeks wiliamson menunjukkan terjadinya peningkatan sejak tahun 2001 sampai 2013. Pada tahun 2001 nilai indeks wiliamson sebesar 0.356, kemudian meningkat pada tahun 2009 sebesar 0.37 dan sampai tahun 2014 nilai indeks wiliamson sebesar 0.49 (Rosmeli, 2015). Begitu juga dengan ukuran ketimpangan antar individu dengan berdasarkan data indeks gini tahun 2009-2014 di Provinsi Jambi menunjukkan adanya peningkatan dari 0.27 pada tahun 2009 menjadi 0.33 pada tahun 2014 (BPS, Jambi 2016).

## METODE

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi dengan menggunakan tabel dan grafik untuk mengenal pola sejumlah data indikator ataupun variabel yang digunakan serta merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut.

### Analisis Pengelompokkan Ekonomi Daerah

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan klasifikasi ekonomi dan mengidentifikasi posisi perekonomian kabupaten atau kota di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Klasifikasi Kabupaten/ Kota Menurut Klassen Tipologi

	$Y_{ij} > \hat{Y}_j$	$Y_{ij} < \hat{Y}_j$
$R_{ij} > R_j$	Kuadran I Daerah Maju dan Tumbuh Cepat	Kuadran II Daerah Maju Tapi Tertekan
$R_{ij} < R_j$	Kuadran III Daerah Sedang Berkembang Cepat	Kuadran IV Daerah Relatif Tertinggal

Keterangan :

$Y_{ij}$  = Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan setiap kabupaten/kota di provinsi

$\hat{Y}_j$  = Rata-rata laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan provinsi

$R_{ij}$  = Pendapatan perkapita tiap kabupaten/ kota di provinsi

$R_j$  = Rata-rata pendapatan perkapita provinsi

### Tahapan Model Penelitian Dengan Analisis Regresi Linear

Adapun tahapan yang akan dilaksanakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

#### 1. Uji *Root Test*

Sebelum melakukan estimasi terhadap hasil penelitian, perlu dilakukan uji akar unit atau *root* untuk menghindari

*spurious regression*. Suatu variabel dikatakan stationer jika nilai rata-rata dan variansnya konstan sepanjang waktu dan nilai kovarian antara dua periode waktu yang hanya tergantung pada selisih atau selang antara dua periode waktu tersebut (Aktivani, 2019).

Mengingat data-data ekonomi biasanya bersifat fluktuatif, maka uji stationer perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada hasil estimasi regresi. Bila data telah stationer maka dilakukan pengujian lainnya.

2. Uji Kesesuaian (*Test Of Godness of Fit*)

Uji statistik ini dilakukan untuk mengukur apakah variabel bebas secara individu dan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait

- a. Uji Partial (Uji t-Statistik)
- b. Uji Best of Fit Model (Uji f- Statistik)
- c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

3. Uji Pelanggaran Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas. Jika koefisien di antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinieritas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1), jika terjadi korelasi maka ada indikasi ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

c. Uji Normalitas

Penelitian ini melihat nilai *probability* JB dan derajat kepercayaan

yang ditentukan dalam penelitian, maka hasil pengujian menunjukkan  $H_0$  di terima apabila nilai Prob JB-statistik  $< \alpha$  dan  $H_0$  di tolak apabila nilai Prob JB-statistik  $> \alpha$ .

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Asumsi penting model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang tercakup dalam fungsi regresi populasi bersifat homoskedastisitas, artinya semua memiliki varians yang sama,

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**Gambaran Umum Daerah Penelitian**

1. Gambaran Demografis

Kondisi demografis Daerah merupakan kondisi yang menggambarkan kependudukan suatu daerah. Kondisi ini memberikan informasi tentang kependudukan yang akan diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan suatu daerah.

2. Kependudukan

Tabel 1, berikut memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2011-2015.

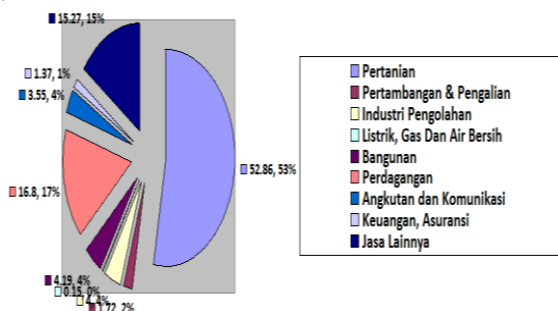
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011-2015

No	Kab/ Kota	2015	2014	2013	2012	2011	
1	Kerinci	234.912	234.003	236.762	235.790	235.251	
2	Merangin	365.763	360.187	358.530	350.062	341.563	
3	Sarolangun	277.733	272.203	267.549	259.963	252.421	
4	Batang Hari	260.290	257.201	258.016	252.731	247.386	
5	Muaro Jambi	398.196	388.323	376.619	363.994	351.553	
6	Tanjab Timur	213.536	212.084	212.218	211.057	210.420	
7	Tanjab Barat	310.422	304.899	301.469	293.594	285.731	
8	Tebo	330.403	324.929	321.641	313.420	305.202	
9	Bungo	343.489	336.320	329.934	320.300	310.737	
10	Kota Jambi	575.388	568.062	569.331	557.321	545.193	
11	Jambi	3.310.132	3.258.211	3.232.069	3.158.232	3.085.457	
		Laju Pertumbuhan 2011-2015					1.90%

Sumber: BPS, Jambi

### Ketenagakerjaan

Hal ini disebabkan karena perekonomian di Provinsi Jambi masih didominasi sektor pertanian yang mempunyai kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.



Gambar 1. Persentase Penduduk Jambi Berusia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 (Sumber, BPS Jambi, 2016)

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek pembangunan manusia merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia selain pembangunan fisik suatu daerah. Indeks pembangunan manusia dapat digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas manusia sebagai roda penggerak perekonomian suatu daerah. Ukuran indeks pembangunan manusia dalam dasar pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai hasil pembangunan. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan arah kebijakan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2011-2015 menunjukkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi mengalami penurunan yang berarti pada tahun 2015. Laju pertumbuhan pada tahun 2011 adalah sebesar 8.07 % kemudian laju pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2015. Penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2015 juga diikuti dengan

penurunan laju pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jambi.

Tabel 2. Penurunan Laju Pertumbuhan Pada Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Kerinci	5.71	7.5	6.16	9.06	6.45
2	Kab. Merangin	7.25	6.37	6.45	7.13	5.48
3	Kab. Sarolangun	9.67	9.93	8.69	5.25	4.47
4	Kab. Batang Hari	9.85	8.4	6.67	7.68	4.58
5	Kab. Muaro Jambi	8.62	7.62	7.48	8.92	6.03
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	6.87	5.74	7.76	8.48	6.56
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	8.51	7.47	8.25	9.42	6.02
8	Kab. Tebo	9.4	8.1	7.9	9.3	5.5
9	Kab. Bungo	7.68	9.65	9.01	6.74	5.12
10	Kota Jambi	8.3	9.65	9.02	6.74	5.57
11	JAMBI	8.07	8.63	7.86	8.19	5.69

### Struktur Perekonomian Daerah

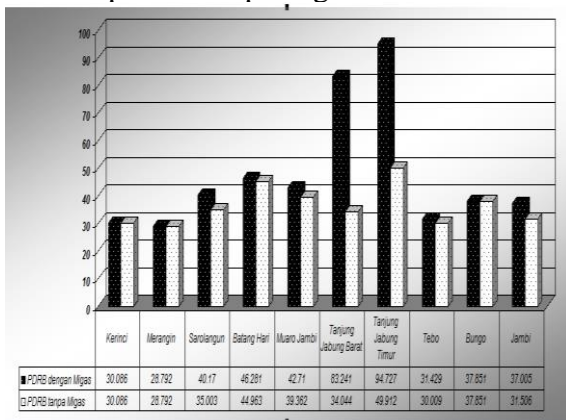
Struktur perekonomian menggambarkan kontribusi atau peran setiap sektor lapangan usaha terhadap total perekonomian daerah. Nilai kontribusi dapat menggambarkan kemampuan sektor lapangan usaha dalam mengerakkan perekonomian daerah. Struktur perekonomian sektoral Provinsi Jambi dapat di lihat pada tabel berikut

Tabel 3. Struktur Perekonomian Sektoral Provinsi Jambi

No	SEKTOR LAPANGAN USAHA	Nilai Kontribusi (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,32	25,26	25,12	25,96	26,24
B	Pertambangan dan Penggalian	27,9	27,33	26,57	25,79	24,7
C	Industri Pengolahan	11,48	11,49	11,64	11,36	11,16
D	Pengadaan Listrik dan gas	0,04	0,01	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah dan limbah	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	5,75	6,29	7,03	7,13	7,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran	8,51	8,66	8,77	8,89	9,47
H	Transportasi dan Pergudangan	2,97	3,01	3,03	3,06	3,13
I	Akomodasi dan Makan Minum	0,92	0,93	0,92	1,02	1,04
J	Informasi dan Komunikas	3,24	3,25	3,24	3,23	3,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,27	2,38	2,3	2,25
L	Real Estate	1,56	1,54	1,52	1,44	1,44
M,N	Jasa Perusahaan	1,13	1,1	1,05	1,03	1,05
O	Administrasi & Pertahanan &	3,44	3,34	3,27	3,45	3,54
P	Jasa Pendidikan	3,38	3,36	3,31	3,13	3,23
Q	Jasa Kesehatan	0,95	0,98	0,99	1,06	1,12
R,S, T,U	Jasa Lain	1,04	1	0,99	0,97	1,01
	TOTAL	100	100	100	100	100

**Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten atau Kota Provinsi Jambi**

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Pendapatan perkapita daerah penghasil migas tidak sama dengan pendapatan perkapita daerah yang tidak menghasilkan migas. Ketimpangan pendapatan perkapita antara daerah penghasil migas dan nonmigas di Provinsi Jambi pada tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.

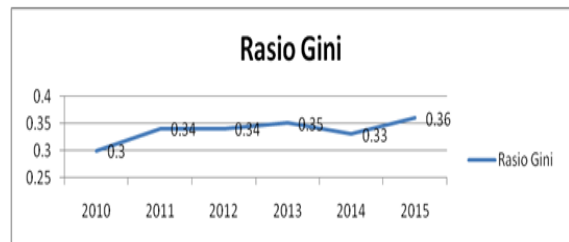


Gambar 2. PDRB Perkapita Dengan Migas dan Tanpa Migas Antar Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Pada Tahun 2015 (dalam juta Rp)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten dan kota penghasil migas dan non migas di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur memiliki gap terbesar antara PDRB perkapita dengan migas dengan tanpa migas. PDRB Perkapita Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur dengan migas masing-masing sebesar 83,24 juta dan 94,72 juta rupiah, sedangkan apabila tanpa migas PDRB Perkapita masing-masing sebesar 34.04 juta dan 49.91 juta rupiah.

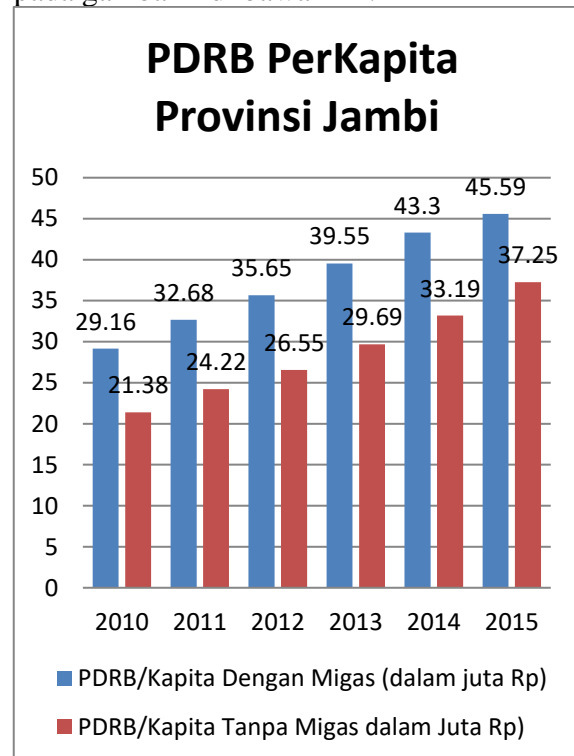
Perbedaan ketimpangan pendapatan antar kelompok individu di Provinsi Jambi menggunakan indicator indeks gini. Rasio gini provinsi Jambi menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun 2010 sampai 2015. Rasio gini pada tahun 2010 sebesar 0.3

meningkat pada tahun 2011 menjadi 0.34 dan menurun pada tahun 2014 menjadi 0.33 dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 0.36. Pada tahun 2015 menunjukkan tingkat ketimpangan yang terbesar selama periode 2010-2015. Hal ini dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Tingkat Ketimpangan Yang Terbesar Selama Periode 2010-2015

Perbedaan PDRB Perkapita Provinsi Jambi dengan migas dan nonmigas menunjukkan terjadinya kenaikan sejak periode 2010-2015, hal ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Perbedaan PDRB Perkapita Provinsi Jambi Dengan Migas Dan Nonmigas Menunjukkan Terjadinya Kenaikan Sejak Periode 2010-2015



### Tingkat dan Perkembangan Ketimpangan Dengan Analisis Tipologi Klassen

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan adalah perkembangan Wilayah. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan Wilayah dari segi ekonomi diantaranya adalah tipologi kelas. Penilaian perkembangan wilayah dari segi ekonomi menggunakan analisis tipologi kelas antara lain dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita Wilayah tersebut.

Hasil pengelompokan Wilayah dari analisis ini menunjukkan terjadinya tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jambi. Analisis ini membagi wilayah menjadi empat kuadran. Kuadran I adalah kelompok daerah yang maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapitanya berada di atas rata-rata Provinsi. Kuadran II adalah daerah yang maju tapi tertekan dengan laju pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi tetapi PDRB perkapita di atas rata-rata PDRB perkapita provinsi. Kuadran III adalah daerah sedang berkembang dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata akan tetapi PDRB perkapita dibawah rata-rata Provinsi. Kuadran IV adalah daerah yang cukup tertinggal, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita berada di bawah rata-rata Provinsi.

Table 4. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2015

		Laju Pertumbuhan Ekonomi	
		Di Atas Rata-Rata	Di Bawah Rata-Rata
PDRB Perkapita	Di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Maju Tapi Tertekan
		Muaro Jambi Tanjung Barat	Batang Hari Bungo
	Di Bawah Rata-Rata	Daerah Sedang Berkembang	Daerah Tertinggal
		Kerinci	Merangin

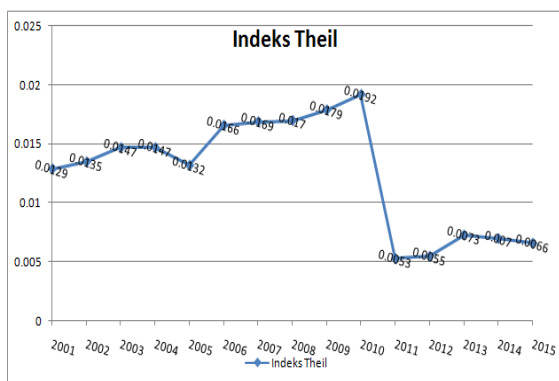
		Tanjung Jabung Timur Kota Jambi	Sarolangun Tebo
--	--	---------------------------------	-----------------

### Analisis Ketimpangan Ekonomi Dengan Indeks Theil

Analisis tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah provinsi Jambi dilakukan dengan menggunakan indeks theil. Indeks theil mampu menjelaskan penyebab ketimpangan antar wilayah. Dengan *indeks theil* dapat diketahui sumber ketimpangan pembangunannya baik antar wilayah pembangunan (*between*) maupun dalam wilayah pembangunan (*within*).

Penentuan wilayah pembangunan di Provinsi Jambi dilakukan berdasarkan RTRW Provinsi Jambi. Berdasarkan RTRW Povinsi Jambi, wilayah pembangunan terbagi atas III, yaitu wilayah pembangunan A, wilayah pembangunan B dan wilayah pembangunan C. Wilayah pembangunan A terdiri dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Wilayah pembangunan B terdiri dari Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun. Wilayah pembangunan C terdiri dari Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

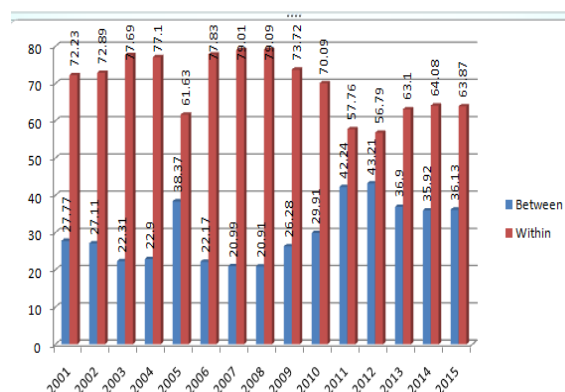
Nilai *theil* yang semakin besar menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin besar begitupun sebaliknya, nilai *theil* yang semakin kecil menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin menurun atau mendekati merata. Perkembangan indeks *theil* dengan menggunakan data PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan di Provinsi Jambi dapat di lihat pada gambar 5, berikut



Gambar 5. Perkembangan Indeks Theil di Provinsi Jambi Tahun 2001-2015

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ketimpangan di Provinsi Jambi pada tahun 2001-2010 menunjukkan terjadinya fluktuasi. Pada tahun 2001 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan (*divergence*) dari 0.0129 menjadi 0.0192 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal pemekaran wilayah yang terjadi di provinsi Jambi pada tahun 2008 tidak mengindikasikan pemerataan pembangunan bahkan sebaliknya terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah dikarenakan di awal pemekaran sumber pembiayaan pembangunan daerah pemekaran masih berasal dari bantuan pusat dan daerah belum bisa mengeksplorasi sumber daya unggulan daerah tersebut. Seiring berjalannya proses pembangunan, tingkat ketimpangan kembali menurun. Penurunan ketimpangan terjadi pada tahun 2011 yaitu menjadi 0.0053 kemudian menurun lagi pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2015 menjadi 0.0066.

**Sumber Ketimpangan Berdasarkan Dekomposisi Indeks Theil (*Within-Between*)**



Gambar 6. Persentase Sumber Ketimpangan Ekonomi DI Provinsi Jambi tahun 2001-2015

Berdasarkan gambar 6 di atas dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2001-2015 sumber utama ketimpangan berasal dari ketimpangan dalam wilayah pembangunan (*within*) yang menyumbang lebih dari 60 % dari total ketimpangan di provinsi Jambi, sedangkan ketimpangan antar wilayah diantara wilayah pembangunan hanya menyumbang di bawah 40 %.

Ketimpangan ekonomi antar daerah di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan indeks theil selama periode 2001-2015 menunjukkan terjadinya tingkat konvergensi dan divergensi. Pada tahun 2001 indeks ketimpangan sebesar 0,0129 kemudian meningkat menjadi 0,135 dan pada tahun 2010 menjadi 0,0192. Setelah tahun 2010 ketimpangan menurun menjadi 0,0053 dan mengalami fluktuasi menjadi meningkat kembali dan menurun pada akhirnya pada tahun 2015.

Pada tahun 2006 sumber ketimpangan lebih dari 70 % berasal dari dalam wilayah pengembangan, sedangkan sisanya berasal dari antar wilayah pengembangan. Kemudian pada tahun 2007 hingga pada tahun 2015 sumber ketimpangan dari dalam wilayah pengembangan mulai menurun dan sumber ketimpangan dari

antar wilayah pengembangan dari tahun 2007 meningkat hingga pada tahun 2015.

Perihal ini diperkuat pada penelitian Mallarangang (2018), di mana pada penelitiannya, dari hasil analisis Indeks Theil menunjukkan telah terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan Nilai Indeks Theil selama periode 2011-2015 menunjukkan ketimpangan untuk Sektor Industri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan Jasa Lainnya, dan hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah. Sedangkan pada penelitian Maulana (2019), di mana berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di provinsi kalimantan selatan pada tahun 2010-2017, dapat disimpulkan meskipun mengalami penurunan selama tahun 2010-2017, ketimpangan pembangunan antar kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkhawatirkan. Hal tersebut bisa digambarkan oleh Indeks Williamson yang menunjukkan level menengah dan tinggi karena berada di sekitar 0,5.

Sumber ketimpangan lebih besar terjadi di dalam wilayah pengembangan, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang tidak merata dan banyak terpusat pada daerah yang menjadi pusat pertumbuhan.

Di bawah ini merupakan hasil uji multikolinieritas, autokolerasi, dan Heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Variabel Bebas	Korelasi Matriks		
	PE	RBI	IPM
PE	1.000	-0.28453	0.091258
RBI	-0.28453	1.000	0.598365
IPM	-0.091258	0.598365	1.000

Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi

F Statistic :	Prob. F :
3.842711	0.0622
Obs* R-Squared :	Prob chi-square2:
6.909105	0.0316

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-Statistik	Prob F (3,11)
1.1419	0.3750
Obs*R-Squared	Prob Chi Square(3)
3.5621	0.3128
Scale explained SS	Prob Chi Square (3)
2.3720	0.4989

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1). Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Povinsi Jambi selama periode 2001-2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 sampai pada tahun 2010 terjadi peningkatan indeks theil dari semula sebesar 0.0129 pada tahun 2001 menjadi 0.0192 pada tahun 2010, kemudian pada tahun berikutnya terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 0.0053 kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi 0.0055 dan pad atahun 2013 menjadi 0.0073 kemudian kembali menurun pada tahun 2015. Sumber total ketimpangan pembangunan antar wilayah lebih dari 60 % berasal dari ketimpangan dalam wilayah pembangunan, dan sisanya kurang dari 40% berasal dari ketimpangan antar wilayah pembangunan, 2). Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan atau menurunkan ketimpangan pembangunan, begitu juga dengan variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan menurunkan ketimpangan pembangunan. Sedangkan variabel rasio belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di provinsi Jambi, dan 3). Ada beberapa implikasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi yang dapat dilaksanakan dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut: a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah kuadran IV yang masih terisolir dengan memprioritaskan daerah tersebut, b). pemeratakan pembangunan



infrastruktur hingga mencapai daerah terisolir sehingga dapat menghubungkan daerah sentra produksi pertanian dengan daerah pusat pertumbuhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aktivani, S. (2019). Uji Stasioneritas Data Inflasi Kota Padang Periode 2014-2019. *Jurnal Statistika Industri dan Komputasi*, 6(1), 26-33.

BPS, Jambi. (2016). Ukuran Ketimpangan Antar Individu. <https://jambi.bps.go.id>

Ekwarso, H., Taryono, T., & Isyandi, I (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Di Kota Dumai. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), 1-16.

Mallarangang, I. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 2(1). Retrieved from <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/10>

Maulana, A. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *JIEP*, 19(1), 1-6.

Pauzi, A., & Budiana, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *EJurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(6), 668-691.

Rosmeli, R. (2015). Dampak Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2).

<https://doi.org/10.22437/paradigma.v10i2.3681>

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Terok, V. J., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 108-118.

Yusniar, R., (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 9(1), 1-14.